

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi resistensi konstruktif yang diterapkan oleh Filipina terhadap klaim sepihak Republik Rakyat Cina di LCS merupakan suatu pendekatan non-konfrontatif yang terstruktur, berlapis, dan berdimensi simbolik, legal, serta diplomatik. Meskipun Filipina berada dalam posisi asimetris secara material dibandingkan dengan Cina, strategi ini mampu menghasilkan pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi, norma, dan dukungan internasional terhadap klaim maritimnya.

Adapun keempat dimensi utama dalam resistensi konstruktif yang berhasil diidentifikasi dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Tindakan Konstruktif:** Melalui berbagai langkah hukum dan simbolik, seperti penerbitan *administrative map of the Philippines* pada 2023 & 2024, pengesahan *Maritime Zones Act* dan *Archipelagic Sea Lanes Act*, serta peningkatan protes diplomatik dan kegiatan edukasi nasional, Filipina membangun fondasi legal dan simbolik yang memperkuat klaim atas wilayah *West Philippine Sea*. Tindakan-tindakan ini bukan hanya bersifat domestik, melainkan juga berfungsi sebagai intervensi simbolik yang membungkai ulang klaim sebagai sah menurut hukum internasional.
2. **Rekonfigurasi Naratif:** Filipina secara konsisten membangun narasi tandingan melalui penamaan ulang wilayah menjadi *West Philippine Sea*, penegasan putusan arbitrase 2016, dan penyebaran kosakata simbolik melalui media, forum internasional, serta peta nasional. Narasi ini membentuk counter-discourse terhadap dominasi wacana "*Nine-Dash Line*" milik Cina, dan telah mempengaruhi adopsi istilah serta pengakuan internasional oleh negara-negara mitra seperti AS, Jepang, Australia, dan Uni Eropa. Narasi ini telah menjadi instrumen diplomatik yang memperkuat posisi moral dan legal Filipina di tingkat global.
3. **Perubahan Inkremental dan Kumulatif:** Resistensi Filipina menunjukkan karakter evolusioner melalui tiga fase besar antara 2016 hingga 2024: fase

pengabaian awal di bawah pemerintahan Duterte, fase reaktivasi diplomatik pasca-2019, dan fase konsolidasi di bawah Presiden Marcos Jr. Penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan internasional terhadap Filipina tidak terbentuk secara instan, melainkan tumbuh melalui rangkaian peristiwa hukum dan diplomatik yang saling memperkuat, seperti pengajuan *note verbale* oleh berbagai negara, komunikasi G7, serta pernyataan eksplisit dari pejabat tinggi negara mitra.

4. **Pendekatan Non-Konfrontatif:** Inti dari strategi Filipina adalah penolakan terhadap respons militer. Alih-alih menempuh jalur agresif, Filipina memilih jalur diplomasi hukum, penguatan aliansi non-kombatan (melalui EDCA dan patroli bersama), serta kampanye legal di forum-forum internasional seperti ASEAN, PBB, dan UNCLOS. Pendekatan ini terbukti mampu menghindari eskalasi sambil mempertahankan posisi strategis di kawasan, menjadikan Filipina sebagai aktor yang kredibel dalam tata kelola maritim berbasis aturan (*rules-based maritime order*).

Dengan demikian, penelitian ini telah **menjawab** rumusan masalah utama yang diajukan, yaitu bagaimana Filipina menggunakan strategi resistensi konstruktif untuk menghadapi ekspansi klaim sepihak Cina di LCS tanpa mengandalkan kekuatan militer. Penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi tindakan simbolik, hukum, diplomatik, dan naratif yang dijalankan secara sistematis dan inkremental dapat **menghasilkan dampak geopolitik yang nyata**, bahkan bagi negara dengan kapabilitas terbatas.

Resistensi konstruktif Filipina tidak hanya berhasil membentuk counter-hegemony atas dominasi narasi dan klaim Cina, tetapi juga memperluas spektrum legitimasi internasional terhadap klaimnya. Dengan menyelaraskan dirinya pada prinsip hukum internasional dan memperkuat norma kawasan, Filipina telah memposisikan dirinya sebagai pelopor simbolik dalam pembelaan terhadap tatanan maritim yang berbasis aturan.